

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendidikan

a. Tingkat Pendidikan

Kemiskinan di negara ini menimbulkan masalah besar yang berimbas pada masyarakat seperti sulitnya memenuhi kebutuhan pendidikan, tidak bisa memperoleh fasilitas kesehatan yang baik, serta rendahnya kesempatan kerja (Nano, 2009). Banyak hal yang menjadi faktor munculnya kemiskinan, salah satunya adalah pengetahuan yang rendah dari setiap masyarakat. Rendahnya ilmu pengetahuan terjadi karena pendidikan yang rendah ataupun tidak memperoleh kesempatan mendapatkan pengetahuan (Todaro dan Smith, 2009).

Pendidikan merupakan hal yang penting karena mampu membantu meningkatkan perekonomian suatu negara, seperti:

1. Menciptakan angkatan kerja yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sehingga mampu bekerja lebih produktif
2. Lapangan pekerjaan akan tersedia sehingga terdapat peluang untuk mendapatkan penghasilan
3. Munculnya pemimpin-pemimpin yang berpendidikan dalam pemerintahan ataupun perusahaan

4. Melalui pendidikan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pelatihan sehingga memperoleh kemampuan dalam membaca, berhitung dan menulis (Todaro, 1995).

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pendidikan dapat ditempuh seluruh masyarakat melalui tiga cara yakni:

- (a) Pendidikan formal, yaitu struktur pendidikan yang terdapat jenjang dari mulai tingkat dasar, menengah hingga tinggi. Pada tingkat dasar tahap paling awal dari pendidikan terdiri dari sekolah dasar dan menengah pertama. Pendidikan menengah merupakan jenjang lanjutan berupa Sekolah Menengah Atas ataupun Kejuruan. Sedangkan pendidikan tinggi adalah jenjang setelah menempuh pendidikan menengah yang terdiri dari perguruan tinggi dari mulai diploma hingga doctor.
- (b) Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang ditempuh masyarakat untuk menggantikan pendidikan formal ataupun sebagai pelengkap karena tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan mereka
- (c) Pendidikan informal, merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh lingkungan sekitar baik keluarga ataupun teman belajar.

Pendidikan merupakan bekal dimasa mendatang untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik serta turut membantu dalam

pembangunan perekonomian terutama di negara berkembang seperti Indonesia jika terprogram dan terlaksana dengan baik sehingga akan memutus rantai kemiskinan.

2. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima seseorang ataupun rumah tangga yang terdiri dari penerimaan sebagai tenaga kerja atau disebut upah, penghasilan dari sewa, bunga dan deviden, serta penerimaan tunjangan sosial dari pemerintah (Samuelson dan Nordhaus, 1999). Dalam buku karangan Soediyono dijelaskan bahwa pendapatan adalah upah yang diperoleh masyarakat sebagai balas jasa karena faktor-faktor produksinya turut menyumbang dalam pembentukan produk nasional (Soediyono,1998).

Jadi berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa pendapatan merupakan imbalan yang diperoleh seseorang karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, imbalan tersebut dapat berupa imbalan dari perusahaan terhadap pegawainya karena telah menyelesaikan pekerjaan atau karena telah memberikan jasanya yang dinilai dalam bentuk uang.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan menurut Mulyanto (1982) yakni:

1. Pekerjaan atau jabatan

Pekerjaan/jabatan dibagi menjadi dua kelompok yakni pekerjaan basah dan pekerjaan kering. Pekerjaan basah yakni yang dianggap memberikan lebih banyak dana kesejahteraan kepada karyawannya seperti karyawan yang bekerja pada naungan departemen keuangan, perdagangan dan kesehatan, sedangkan pekerjaan/jabatan kering yakni kurang memberikan kesejahteraan kepada pegawainya seperti yang berada dibawah naungan departemen agama, sosial, industri dll.

2. Tinggi rendahnya pendidikan

Pendidikan seseorang tentu akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan status sosial dalam masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang maka semakin tinggi pula pendapatan yang mereka peroleh, berbeda halnya dengan masyarakat yang status pendidikannya rendah.

3. Lama masa kerja

Masa kerja seorang pegawai dapat dikatakan tinggi jika orang tersebut telah menjadi karyawan lebih dari 17 tahun, sedangkan dikatakan rendah jika belum mencapai 17 tahun. Lamanya masa kerja tentu akan berpengaruh pada pendapatan atau gaji pokok yang diterima. Semakin

lama masa kerja pegawai maka gaji pokok yang mereka peroleh pasti akan meningkat.

4. Banyaknya anggota keluarga

Jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan karena jika seluruh anggota yang ada telah bekerja maka sudah pasti pendapatan rumah tangga akan meningkat.

c. Pendapatan rumah tangga

Pendapatan rumah tangga merupakan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang diperoleh kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya atas balas jasa faktor produksi berupa gaji, upah, bonus dan lain-lain, pendapatan atas balas jasa kapital yang berupa bagi hasil, bunga dan lain-lain, serta pendapatan yang diperoleh dari pihak lain atau transfer (BPS, 2017).

Pendapatan yang diterima suatu rumah tangga terdiri dari beberapa sumber yakni (Sumardi, 1982):

1. Penghasilan yang diperoleh anggota keluarga rumah tangga dari gaji atau upah sebagai pekerja atas balas jasanya karena telah melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan/instansi.
2. Penghasilan yang diperoleh atas usaha yang didirikan oleh rumah tangga itu sendiri ataupun pendapatan yang diterima dari pekerjaan bebas yang dilakukan oleh anggota keluarga.
3. Penghasilan atas pemilikan harta anggota rumah tangga.

Pendapatan rumah tangga dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh anggota keluarga dari semua sumber pendapatan yang didapat. Pendapatan yang diperoleh setiap rumah tangga juga berbeda, hal ini karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tidak cukup jika hanya mengandalkan satu pekerjaan utama saja melainkan dibutuhkan pekerjaan tambahan lainnya (Rita, 2007).

d. Upah Minimum

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang Undang Republik Indonesia No.13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai *”Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap...”*. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya.

Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah

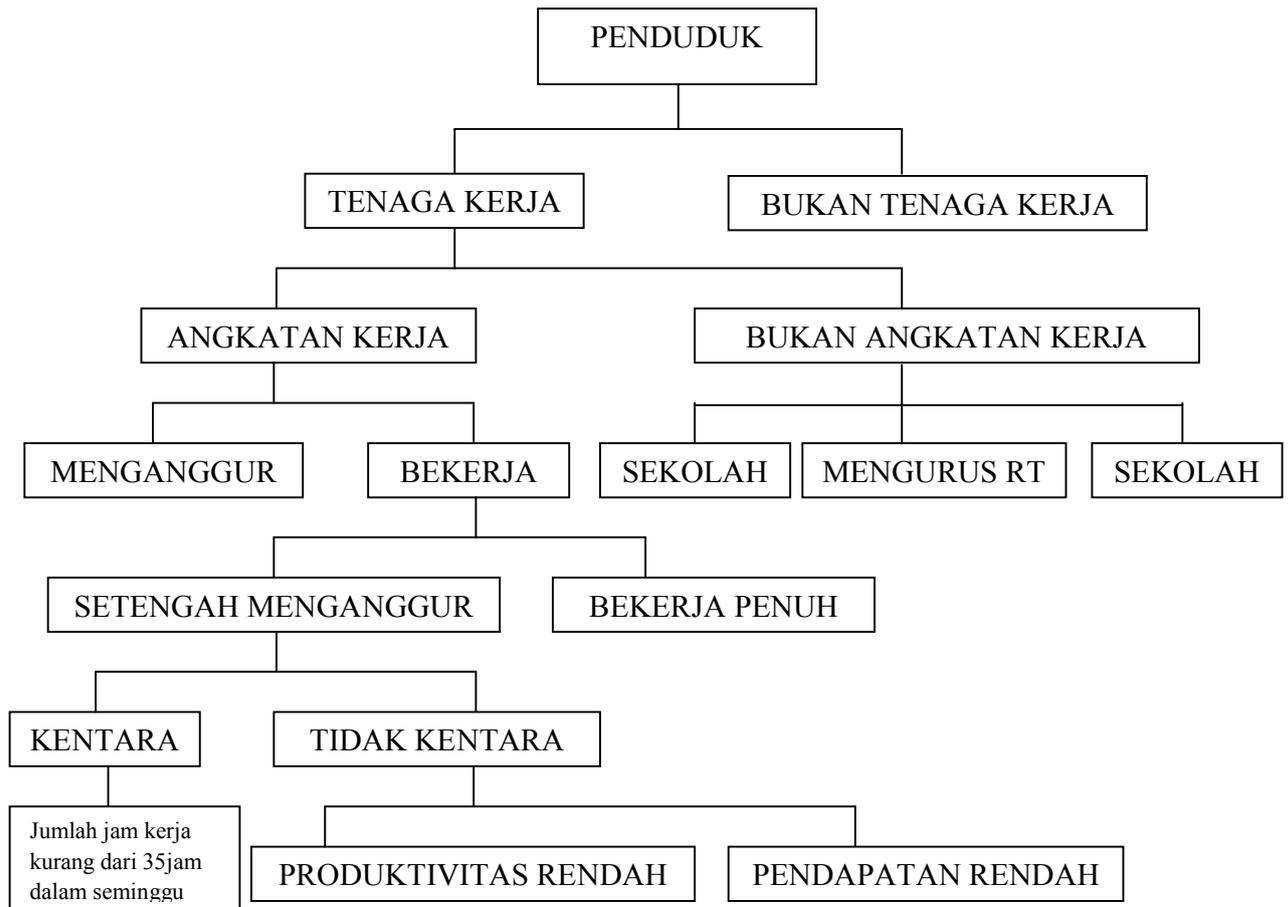
minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut (Rini, 2012).

3. Penyerapan Tenaga Kerja

a. Pengertian Tenaga kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam buku Mulyadi (2003), tenaga kerja adalah penduduk di suatu negara yang usianya berada dalam batas usia kerja (15-64 tahun) serta dapat melakukan kegiatan produksi apabila terdapat permintaan berupa tenaga sebagai pekerja. Terdapat dua golongan penduduk yang ada di suatu negara yakni tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Setiap negara memiliki peraturan tentang batas usia yang berbeda, hal ini tergantung pada keadaan tenaga kerja di setiap negara. Di Indonesia sendiri awalnya batas usia untuk bekerja adalah 10 tahun keatas, hal ini karena masyarakat Indonesia terutama di pedesaan sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada batas usia tersebut. Namun Departemen Pendidikan memberlakukan program yakni wajib belajar 12 tahun, sehingga batas usia diubah menjadi 15 tahun.

Rincian tenaga kerja dalam hubungannya dengan penduduk menurut Tohar (2000), adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Rincian Tenaga Kerja dalam Hubungannya dengan Penduduk

b. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah keadaan dimana tersedianya lapangan pekerjaan karena adanya kegiatan ekonomi sehingga banyak penduduk dengan usia kerja (15 tahun keatas) terserap sebagai pekerja di suatu

perusahaan atau pemerintahan (Asfitsani, 2012). Kesempatan kerja dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kesempatan kerja permanen, yakni seseorang dapat bekerja pada perusahaan tersebut sampai tiba masa pensiun
2. Kesempatan kerja temporer, adalah kesempatan kerja dimana seseorang bekerja di suatu perusahaan atau pemerintahan dalam waktu yang singkat atau hanya sementara dan setelah itu akan menjadi pengangguran kembali.

c. Penyerapan tenaga kerja

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda. Pada kebanyakan negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja yang selanjutnya semakin dicitkan oleh faktor-faktor eksternal seperti memburuknya neraca pembayaran, meningkatnya masalah hutang luar negeri dan kebijakan lainnya yang mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah dan penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2000).

Penyerapan tenaga kerja adalah menyerap tenaga kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha. Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan secara luas yaitu diterimanya para pelaku

tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya, atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja (Tohar, 2000).

d. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perhitungan untuk menggambarkan berapa jumlah angkatan kerja pada kelompok yang umum dan merupakan persentase penduduk pada kelompok umur tersebut.

$$TPAK = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$$

Cara menghitung seberapa besar tingkat partisipasi angkatan kerja adalah dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja kemudian dikali 100%. Perhitungan TPAK dapat digunakan untuk seluruh penduduk ataupun kelompok penduduk tertentu seperti kelompok umur 10-15 tahun yang berada di desa, kelompok laki-laki dan wanita di kota dan lain-lain (Mulyadi, 2003).

Angkatan kerja dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk disuatu negara. Tingginya penduduk usia kerja maka sudah pasti akan mempengaruhi bertambahnya jumlah angkatan kerja. TPAK yang tinggi itu berarti angkatan kerja yang berpartisipasi tinggi. Jika terjadinya peningkatan angkatan kerja diiringi oleh meningkatnya partisipasi penduduk yang bekerja, artinya bahwa meningkatnya TPAK

juga akan menurunkan partisipasi penduduk yang bekerja, dengan kata lain tingginya TPAK disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang meningkat (Mulyadi, 2003).

e. Lama Bekerja

Curahan jam kerja adalah jumlah jam kerja yang dihabiskan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan bekerja. Dengan kegiatan bekerja seseorang dapat memperoleh upah atau penghasilan. Jumlah curahan jam kerja setiap seseorang bekerja tidaklah sama, ada yang bekerja paruh waktu dan ada yang juga bekerja penuh sesuai dengan keinginan sendiri. Oleh karena itu dalam menyediakan waktu untuk bekerja tidak cukup hanya memperhatikan dari jumlah jam kerja per hari tetapi perlu juga diperhatikan dalam setiap minggunya (Sumarsono, 2002).

4. Migrasi

a. Pengertian Migrasi

Migrasi dari desa ke kota adalah masyarakat yang melakukan perpindahan dari desa ke kota dengan meninggalkan pekerjaannya dibidang pertanian untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di perkotaan. Pemerintah telah mengupayakan strategi pencegahan masalah migrasi yang terus meningkat namun lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah perkotaan sangat terbatas. Strategi tersebut berupa (Todaro dan Smith, 2009):

- a. Menyeimbangkan perekonomian desa dan kota dengan adanya pembangunan dibidang pertanian di pedesaan, menyediakan infrastruktur yang memadai di desa serta kesempatan kerja semakin diperluas pada daerah pedesaan.
- b. Industri padat karya yang dikembangkan pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Industri mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak untuk menghasilkan output, sehingga dengan berkembangnya industri akan dapat mengurangi masalah sempitnya lapangan pekerjaan.
- c. Distorsi harga faktor yang dihapuskan. Untuk meningkatkan kesempatan kerja pemerintah berupaya menghilangkan subsidi modal dan menekan kenaikan upah di perkotaan.
- d. Adanya teknologi produksi padat karya dengan biaya rendah dan banyak mempekerjakan tenaga kerja dalam memenuhi infrastruktur di pedesaan.
- e. Dalam kaitannya pendidikan dengan lapangan pekerjaan, pemerintah berupaya merubah kriteria lain untuk merekrut pegawai agar mengurangi munculnya pengangguran terdidik. Serta adanya upaya mengarahkan masyarakat desa yang telah terdidik untuk dapat membangun pedesaan.

- f. Menekan pertumbuhan penduduk untuk mengurangi penawaran tenaga kerja dengan cara program keluarga berencana dan meningkatkan kesehatan pedesaan.
- g. Desentralisasi wewenang ke kabupaten atau wilayah sekitar karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi daerah tersebut sehingga nantinya akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

b. Karakteristik Para Migran

Ada beberapa yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri masyarakat yang melakukan migrasi. Karakteristik tersebut terdiri dari (Todaro, 1998):

1. Karakteristik demografi. Karena semakin tingginya tingkat pendidikan yang diperoleh wanita pada saat ini, membuat jumlah wanita yang melakukan migrasi semakin meningkat. Mereka menjadi migran karena mengikuti suami ataupun ayah, serta menjadi seorang migran karena bekerja.
2. Karakteristik pendidikan. Pendidikan yang tinggi menjadi alasan masyarakat untuk melakukan migrasi ke kota dengan harapan mampu memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari di desa. Kesempatan kerja pada sektor formal di kota hanya ditujukan bagi mereka yang mengenyam pendidikan dari mulai sekolah menengah hingga ke tingkat tertinggi.

3. Karakteristik ekonomi. Tingkat upah yang berbeda antara kota dan desa menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan migrasi ke perkotaan yang upahnya jauh lebih besar, mengingat semakin berkembangnya sektor industri di kota-kota besar.

c. Faktor-faktor Migrasi

Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan migrasi, yakni sebagai berikut (Todaro, 1998):

- 1) Faktor sosial, yakni masyarakat melakukan migrasi karena ingin keluar dari kelompok masyarakat tersebut yang dirasa kurang sesuai dengan keinginan mereka.
- 2) Faktor fisik, bencana ataupun kekeringan menjadi faktor masyarakat memutuskan untuk menjadi migran.
- 3) Faktor demografi, tingginya pertumbuhan penduduk disuatu desa membuat masyarakat melakukan migrasi karena jumlah penduduk yang semakin meningkat akan mengurangi kesempatan kerja.
- 4) Faktor kultural, budaya masyarakat pada zaman sekarang mempengaruhi masyarakat ingin tinggal dikota dengan gaya hidup yang jauh dari kata sederhana.
- 5) Faktor komunikasi, sarana dan prasarana di perkotaan menjadi daya tarik masyarakat untuk tinggal di kota dengan fasilitas berupa transportasi, komunikasi dan pendidikan yang lebih mumpuni.

5. Konsep Industri

a. Pengertian Industri

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian, dijelaskan bahwa “industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, tidak termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri”. Sektor industri dibagi menjadi beberapa golongan yakni industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang serta industri besar. Industri rumah tangga yakni memiliki tenaga kerja sebanyak 1 sampai dengan 4 orang, industri kecil terdapat 5 sampai 19 orang yang menjadi tenaga kerja diperusahaan, sedangkan industri sedang mempekerjakan sebanyak 20 sampai 99 orang, dan untuk industri besar memiliki tenaga kerja sebesar 100 orang atau lebih dalam perusahaan (BPS Jateng, 2013).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi dimana terdapat proses pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi.

b. Konsep Industri Kecil

Berdasarkan GBHN 1998 ada beberapa kebijakan sebagai prioritas selama Repelita V dalam pembangunan industri salah satunya mengenai industri kecil termasuk industri tradisional yang dikembangkan sebagai upaya untuk menciptakan lapangan usaha yang lebih luas (Muljana, 1993). Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bab 1 Pasal 1, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Industri kecil mempunyai beberapa tujuan yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yakni: (a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; (c) Meningkatkan peran usaha kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Beberapa kebijakan diciptakan sebagai upaya peningkatan dalam mengembangkan industri kecil yakni (Bernadus, 1993):

- a) Mengembangkan industri kecil, di dalamnya termasuk industri kerajinan, industri rumah tangga industri tradisional serta industri informal.
- b) Adanya peningkatan pertumbuhan industri kecil dengan pengembangan profesionalisme, kewiraswastaan oleh pengusaha kecil serta memberi bantuan lain yang diperlukan.
- c) Dengan melakukan pengembangan industri kecil yang berada di daerah tertinggal.
- d) Memperluas industri kecil yang bertujuan ekspor dengan mengembangkan kemampuan produksi.

Menurut Titik (2002), profil industri kecil di Indonesia dibagi menjadi dua yakni dari segi manajemen dan dari segi keuntungan. Berdasarkan segi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Pemilik merupakan pengelola
2. Perencanaan yang dibuat tidak tertulis
3. Pembukuan yang dibuat kurang tertib
4. Pendelegasian wewenang dilakukan secara lisan
5. Mutu kurang dapat dipertahankan

6. Masih bergantung pada pelanggan dan pemasok
7. Hubungan dengan perbankan kurang dibina

Sedangkan profil industri kecil di Indonesia jika dilihat dari segi keuntungan adalah sebagai berikut:

1. Dana yang digunakan sebagai modal kecil dan ketrampilan yang dimiliki masih terbatas
2. Dana yang diberikan oleh perbankan cenderung sedikit.
3. Rendahnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip laporan keuangan dan analisis.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan mengenai kriteria usaha kecil yang terdapat dalam Bab IV Pasal 6 adalah:

- (a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (c) Milik warga negara Indonesia
- (d) Berdiri sendiri, artinya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi

entah langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau dengan usaha besar.

- (e) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Kesimpulan
1.	M.Th. Handayani, Ni Wayan (2009)	Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga	Deskriptif kualitatif	Rata-rata curahan jam kerja responden ibu rumah tangga KWT Boga Sari pada kegiatan membuat jajanolahan sebesar 4,27 jam perhari atau 18,36 jam per minggu dengan rata-rata 4 hari kerja per minggu. Rata-rata sumbangan pendapatan responden ibu rumah tangga anggota KWT Boga Sari terhadap pendapatan rumah tangga sebesar Rp 429.754 atau 12,82% dari total pendapatan keluarga, dengan produktivitas kerja responden sebesar Rp 3.594 per jam.
2.	Arya Dwiandara, Nyoman Djinar (2013)	Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Bebandem	Metode analisis regresi linear berganda	Secara simultan, faktor umur, pendidikan dan pekerjaan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Secara parsial faktor pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan, sedangkan umur tidak berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga.
3.	Agus Kristiyanto (2011)	Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan Melalui	Deskriptif kualitatif	Kepuasan yang diperoleh pelaku usaha mikro industri olahraga terhadap kinerja Pemerintah Daerah atas 8 dimensi iklim usaha bermacam-macam, contohnya di

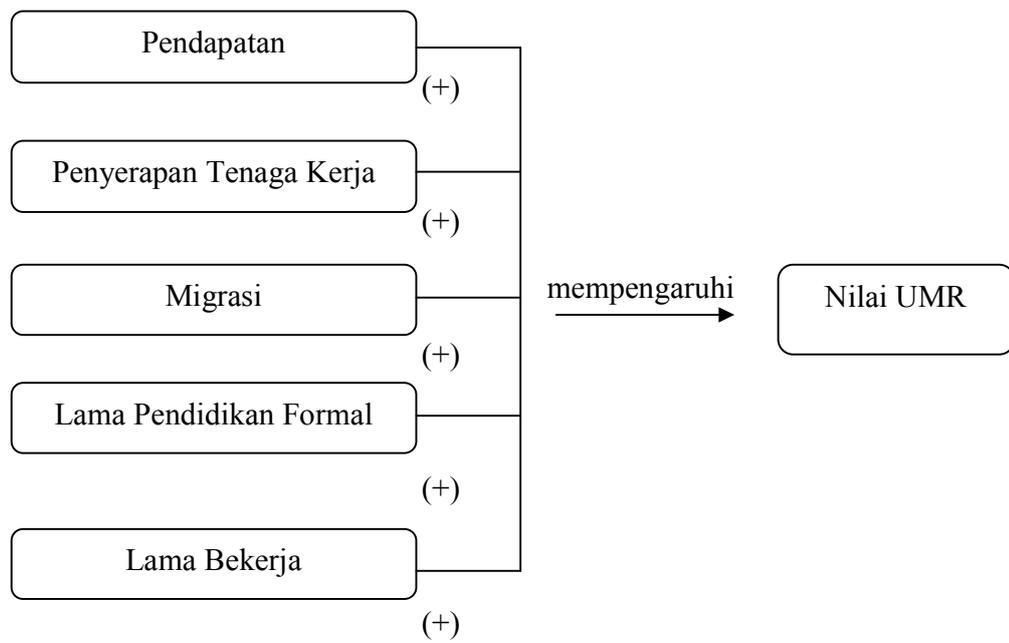
		Pengembangan Industri Mikro Olahraga		Jawa Barat yang memberikan nilai positif yakni promosi dagang dan dukungan lembaga, di Jawa Tengah adalah sarana dan prasarana, dukungan lembaga, kemitraan dan izin usaha, sedangkan di Jawa Timur terdapat 8 dimensi yang memberi nilai positif yakni sarana, pendanaan, kemitraan, izin usaha, informasi usaha, kesempatan berusaha, dukungan lembaga dan promosi dagang. Industri olahraga hanya menyediakan lapangan usaha sampingan karena upah yang masih rendah sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
4.	Nopriansyah dkk (2015)	Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi	Analisis regresi logistik	Klasifikasi desa/kota, pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin rumah tangga, pinjaman usaha, pekerjaan dan jumlah rumah tangga memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh kepala keluarga maka kemiskinan rumah tangga akan berkurang. Setiap penambahan tahun lama pendidikan kepala keluarga maka kemiskinan akan berkurang sebesar 0,142 kali.
5.	Vendi Wijanarko (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jelbuk	Analisis regresi linear berganda	Curahan waktu bekerja memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin, pendidikan juga memberikan pengaruh yang signifikan

		Kabupaten Jember		terhadap pendapatan rumah tangga miskin, serta usia yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin.
6.	Eko Prasetyo (2008)	Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Deskriptif	Peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan menyerap tenaga kerja, namun untuk masyarakat yang kreatif, inovatif dan ulet lebih memilih untuk mendirikan UMKM sendiri sampai usaha tersebut berkembang maka masalah kemiskinan akan mudah teratasi. Modal pada UMKM masih menjadi masalah utama, selain itu yang menjadi kendala terberat yakni pangsa pasar.
7.	Umi Wakhidatus Sholikhah (2016)	Kontribusi Pendapatan Wanita Penambang Pasir Terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga dan Tingkat Kemiskinan di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Deskriptif kuantitatif	Kontribusi pendapatan wanita penambang pasir terhadap pendapatan rumah tangga total yakni sebesar 51%, kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita tanpa ditambah pendapatan wanita adalah sebesar 78,12% rumah tangga masih tergolong miskin, setelah ditambahkan dengan pendapatan wanita sebagai penambang pasir maka 100% rumah tangga telah tergolong tidak miskin.
8.	Tatsufumi Yamagata (2006)	The Garment Industry in Cambodia: Its Role in Poverty Reduction through Export-Oriented Development	Deskriptif kualitatif	Industri ini menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat miskin dengan upah diatas upah minimum Cambodia. Para pekerja lebih didominasi perempuan. Untuk menjadi pekerja tidak diperlukan

				pendidikan dan pengalaman yang tinggi.
9.	Alain De Janvry, dkk (2005)	The Role of Non-Farm Incomes in Reducing Rural Poverty and Inequality in China	Model linear logaritma	Kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan di pedesaan akan semakin meningkat tanpa adanya aktivitas dari non pertanian. Pendidikan, lingkungan, jarak desa ke kota dan efek pedesaan dapat mempengaruhi penghasilan rumah tangga. Aktivitas non pertanian memberikan efek spillover yang positif dalam pertanian rumah tangga.
10.	Michael Lokshin, dkk (2007)	Work-Related Migration And Poverty Reduction In Nepal	Metode OLS	Meningkatnya migrasi internasional mampu mengurangi kemiskinan, sama halnya dengan migrasi domestik yang berperan penting. Strategi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Nepal mempertimbangkan aspek dinamik dari migrasi lokal dan internasional. Masyarakat yang melakukan migrasi dikarenakan pengaruh lingkungan daerah tempat tinggal yang mayoritas masyarakatnya melakukan migrasi baik lokal maupun internasional. Masyarakat yang tergolong miskin lebih memilih melakukan migrasi lokal.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka pemikiran yang difokuskan pada tujuan dalam melakukan penelitian serta menjadi petunjuk untuk meneliti. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat kerangka konsep agar mempermudah dalam penelitian mengenai kemiskinan para pekerja industri keramik. Kemiskinan yang dialami para pekerja industri keramik dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh dari bekerja sebagai pengrajin keramik. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi maka peneliti mencoba melakukan penelitian untuk menganalisa masalah yang terjadi dengan menggunakan variabel bebas berupa pendapatan, penyerapan tenaga kerja, migrasi, lama pendidikan formal dan lama bekerja terhadap nilai UMR para pekerja industri keramik. Dengan digunakannya variabel berikut diharapkan mampu mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam meningkatkan nilai UMR, sehingga dapat membantu pihak terkait dalam mengurangi kemiskinan.



Gambar 2.2. kerangka konsep

C. Hipotesis

1. Diduga pendapatan memberikan pengaruh positif terhadap nilai UMR para pekerja industri kerajinan keramik Desa Klampok.
2. Diduga penyerapan tenaga kerja memberikan pengaruh positif terhadap nilai UMR para pekerja industri kerajinan keramik Desa Klampok.
3. Diduga migrasi memberikan pengaruh positif terhadap nilai UMR para pekerja industri kerajinan keramik Desa Klampok.
4. Diduga lama pendidikan formal memberikan pengaruh positif terhadap nilai UMR para pekerja industri kerajinan keramik Desa Klampok.
5. Diduga lama bekerja memberikan pengaruh positif terhadap nilai UMR para pekerja industri kerajinan keramik Desa Klampok.